

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PBB sebagai organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 yang beranggotakan dari 50 negara dan sekarang menjadi 193 negara bertugas untuk menyelesaikan masalah dengan melalui kesepakatan bersama dari keseluruhan anggota.¹ PBB merupakan organisasi utama yang didedikasikan untuk perdamaian dan keamanan. Ada banyak peranan PBB dalam proses perdamaian yang jejak rekamnya meningkat pesat sejak berakhirnya perang dingin. PBB membedakan beberapa cara intervensi untuk mencapai perdamaian. Selain bantuan kemanusiaan atau bantuan yang dirancang untuk kebutuhan hidup bagi bangsa yang menderita supaya mereka tetap bisa bertahan hidup, kategori – kategori utama intervensi perdamaian PBB ada tiga: Pertama, Menciptakan Perdamaian (Peacemaking), bentuk – bentuk intervensi untuk mengakhiri permusuhan dan menghasilkan kesepakatan melalui cara – cara, politik dan bila diperlukan bisa menggunakan cara militer. Cara diplomatik disini bisa negosiasi kesepakatan, konferensi perdamaian untuk mengakhiri pertentangan.²

Kedua, Menjaga perdamaian (Peacekeeping), intervensi oleh pihak ketiga (PBB) untuk memisahkan pihak yang berperang dan menjaga situasi supaya terhindar dari segala bentuk kekerasan, kemudian memantau dan menegakkan kesepakatan, bila perlu dengan

¹ United Nation official. <http://www.un.org/en/sections/about-un/overview/index.html>. diambil pada tanggal 21 Oktober 2016

² International Peace Academy. *The Peacekeepers Hand Book*. New York Pergamon. 1984

menggunakan kekerasan. Caranya mencakup pengawasan terhadap diromatinya kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatan – kegiatan pengembangan diri yang disepakati³.

Ketiga, Menggalang Perdamaian (Peacebuilding) adalah usaha untuk menciptakan struktur perdamaian dalam kesetaraan dan keadilan bagi pihak – pihak yang berperang yang nantinya akan mengentaskan penyebab dari peperangan dan menyediakan beberapa alternatif penyelesaian. Disini, PBB melaksanakan program – program yang dirancang untuk mengatasi penyebab konflik, penderitaan dari masa lalu, meningkatkan kestabilan dan keadilan jangka panjang⁴. Jika mengacu pada pandangan Johan Galtung, Peacebuilding bisa dipahami dalam dua pandangan. Pertama, mengacu pada perubahan sosial dan pembangunan ekonomi yang nantinya akan mengurangi kesenjangan dan ketidakadilan dalam masyarakat. Kedua, merupakan segala usaha untuk meningkatkan hubungan antar pihak yang bersengkata menuju pada peningkatan kepercayaan dan kerjasama, persepsi yang benar, menciptakan sikap yang positif, dan keinginan politik yang kuat untuk secara konstruktif menghilangkan perbedaan diantara mereka⁵.

Konflik internasional seperti konflik antar-negara tidak lagi menjadi statusnya konflik yang dapat mempengaruhi perdamaian dunia dewasa ini. Setelah era Perang Dingin berakhir, konflik yang terjadi dalam sebuah negara (*Internal Conflict*) muncul di berbagai negara, terutama negara berkembang. Hal-hal yang memicu konflik sangat beragam dan kompleks, beberapa diantaranya seperti; ketidakharmonisan antar-suku, ras dan agama, pemerintahan yang otoriter serta ketimpangan ekonomi. Konflik internal suatu negara tidak hanya

³ Ronald J Fisher 1997, *Interactive Conflict Resolution*, Syracuse University Press. Hal.11

⁴ Simon Fisher at.all. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi untuk Bertindak*. The British Council.Hal. 14

⁵ Johan Galtung, 1976. *Three Approaches to Peace: Peacemaking, Peacekeeping and Peacebuilding*. Dalam buku. Johan Galtung: *Peace War and Defense: Essays in Peace Research II*, Copenhagen, Christian Ejlens. Hal. 282.

mempengaruhi stabilitas pertahanan keamanan nasional dan mengancam kehidupan populasinya tetapi juga mempengaruhi dunia Internasional dalam praktik perdamaian dunia.

Perang sipil Sudan merupakan konflik di Afrika terlama hingga 40 tahun lebih. Setelah kemerdekaanya pada tahun 1952, Sudan beberapa kali terjadinya pemberontakan dari suku etnis seperti suku Anyanya. Walaupun tergolong dengan pemberontakan kecil, hal ini memicu terjadinya pemberontakan besar hingga kudeta militer dari warga sipil.

Setelah pemberontakan Anyanya, sebagian orang dari pemberontak tersebut bergabung dengan *Southern Sudan Liberation Movement* (SSLM) sebagai kelompok pemberontak yang terdiri dari beberapa pemberontak suku Anyanya dan warga sipil yang lain yang tidak setuju dengan pemerintah Sudan. Pada tahun 1972, terjadinya perjanjian Adis Ababa yang mengakhiri konflik sementara di Sudan menyepakati tentang pembentukan pemerintahan otonomi tunggal di Sudan Selatan dan bahasa Inggris sebagai bahasa nasionalnya.

Pada tahun 1983, Pemerintahan Numeiry mengumumkan Sudan sebagai Negara Islam dan menerapkan hukum negara berdasarkan hukum Islam. Hal ini memicu pemberontakan baru oleh *Sudan People's Liberation Army* (SLPA) yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintahan Numeiry. Konflik ini terjadi sangat lama yang menuntut Sudan Selatan sebagai negara merdeka menjadi Negara sendiri tidak termasuk dalam Pemerintahan Sudan.

Wilayah Sudan Selatan, akhirnya mendapatkan kedaulatannya sebagai negara dan ikut dalam anggota PBB setelah terjadinya referendum pada tahun 2011. Akan tetapi referendum tersebut tidak membahas tentang pembagian wilayah untuk Pemerintahan Sudan dan Sudan Selatan. Sehingga memicu pemberontakan baru perebutan wilayah antara Sudan dan Sudan Selatan. Konflik di daerah Darfur mendapat simpati dari banyak negara karena menelan banyak korban, anak – anak di paksa menjadi tentara, dan banyak perempuan yang diperkosa.

Wilayah Abyei seluas 10.460 kilometer persegi yang berproduksi minyak serta pemasok minyak terbesar ketiga di Afrika.⁶ Abyei menjadi daerah baru yang diperdebatkan antara Pemerintahan Sudan dan Sudan Selatan. Konflik Abyei berbeda dengan konflik Darfur, Abyei sendiri terpecah menjadi dua kubu yaitu kelompok Missiry yang ingin bergabung dengan Sudan Utara dan suku Ngok Dinka yang ingin masuk dalam wilayah Sudan Selatan.

B. Rumusan Masalah

Pemerintahan Sudan dan Sudan Selatan mengalami konflik perebutan kota Abyei. PBB membentuk *United Nation Interim Security For Abyei* (UNISFA) dalam misi peacekeeping yang diberi mandat untuk memberikan pengamanan warga sipil di kota Abyei. “Bagaimana strategi UNISFA dalam penyelesaian konflik perebutan kota Abyei antara Pemerintahan Sudan dan Sudan Selatan?”

C. Kerangka Konsep Dan Teori

Konsep Organisasi Internasional (International Organization)

Organisasi Internasional dalam pengertian Michael Hass memiliki dua pengertian dua pengertian yaitu; pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat, dan waktu pertemuan; kedua, organisasi internasional merupakan bagian – bagian yang menjadi kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non-lembaga dalam istilah organisasi internasional tersebut.⁷ Tujuan dari organisasi adalah mengkoordinasikan kegiatan – kegiatan, sedangkan metode organisasi adalah untuk melaksanakan koordinasi secara rutin dengan teknik pembagian tugas dan tugas khusus.

⁶ Pusaran Konflik Sudan - Kompas.com

⁷ Michael Hass dalam Anak Agung Banyu Perwita. 2005. Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, PT Remaja Rosdakarya Offset. Bandung. Hal 93

Cheever dan Haviland mendiskripsikan Organisasi Internasional sebagai pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, yang umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar, untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang member manfaat timbale balik melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan-kegiatan staf secara berkala⁸. Sedangkan berdasarkan Clive Acher Organisasi Internasional sebagai;

Organisasi internasional didefinisikan sebagai suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota-anggota (pemerintah dan non-pemerintah) dari dua atau lebih negara berdaulat dengan tujuan untuk mengejar kepentingan bersama para anggotanya.⁹

Dari pengertian organisasi internasional menurut Clive Archer diatas, United Nations Interim Security For Abyei (UNISFA) sebagai organisasi internasional yang beranggotakan pemerintah dari negara -negara yang berdaulat memiliki struktur organisasi yang formal yang dibentuk berdasarkan kesepakatan Negara - negara anggotanya yang bertujuan untuk mengejar kepentingan para anggotanya yaitu untuk memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan jangka panjang kepada anak - anak sesuai dengan mandatnya.

Sebuah organisasi internasional yang fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan semua kegiatannya. Fungsi organisasi internasional menurut A. Le Roy Bennett dalam bukunya *International Organization: Principles and Issues*, menjelaskan fungsi utama organisasi internasional adalah menyediakan sarana kerjasama antar negara-negara, dimana kerjasama tersebut dapat menghasilkan keuntungan untuk semua atau sebagian besar negara. Selain itu Organisasi Internasional juga memiliki peran untuk menyediakan sarana berupa saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan. Lebih lanjut ia menggolongkan Organisasi internasional modern dalam dua

⁸ John Baylis & Steven Smith, 2001. *The Globalization of World Politics; Second Edition*, Oxford University Press Inc. New York

⁹ Cliver Archer, *International Organization, George Allen and Unwi*. Publisher London. 1983. hal. 35

kategori utama yaitu Inter-governmental Organization (IGO's) dan Non-governmental Organization (NGO's).¹⁰

Berdasarkan kategori organisasi internasional tersebut, UNISFA merupakan Inter-governmental Organization (IGO). Berada dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, UNISFA berdiri sebagai sebuah organisasi internasional yang memiliki ruang lingkup melintas batas negara, batas negara, memiliki prioritas untuk mencapai misimisinya, serta memiki struktur organisasi yang jelas. Dengan mandat menyoroti keamanan manusia yang ada di Abyei, UNISFA tidak terikat oleh negara manapun, sehingga kehadirannya tidak mengancam kedaulatan negara. Peran UNISFA di wilayah Abyei dalam bentuk pengamanan warga sipil dari bentrokan para pemberontak yang saling merebutkan wilayah tersebut.

Anak Agung Banyu Perwita menjelaskan bahwa sebuah Organisasi Internasional memiliki peran yang telah diakui karena keberhasilannya memecahkan permasalahan yang dihadapi suatu negara. Kehadiran organisasi internasional mencerminkan kebutuhan manusia untuk bekerjasama sekaligus sebagai sarana untuk menangani masalah-masalah yang timbul melalui kerjasama tersebut¹¹. Peranan organisasi internasional yang dapat dibagi dalam tiga kategori yaitu;¹²

1. Sebagai instrument, Organisasi internasional digunakan oleh negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan poolitik luar negerinya.
2. Sebagai arena, organisasi internasional merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakam dan membahas masalah-masalah yang dihadapi.

Organisasi internasional juga sering digunakan oleh beberapa negara untuk

¹⁰ Le Roy A. Bennet, 1997. *International Organizations: Principles and Issues*. New Jersey: Prentice Hall Inc. Hal 2-3

¹¹ Perwita. Anak Agung Banyu, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal 95

¹² Archer dalam Anak Agung Banyu Perwita, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hal 95

mengangkat masalah dalam negerinya, ataupun masalah dalam negeri negara lain dengan tujuan mendapatkan perhatian internasional.

3. Sebagai aktor independen, organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan dari luar organisasi.

Konsep peran organisasi internasional menepatkan UNISFA sebagai aktor independen dalam melaksanakan fungsi dan perannya. Lembaga ini dapat bertindak sesuai dengan kewenangan yang ada tanpa dipengaruhi oleh pihak-pihak dari luar yang dapat dipergunakan oleh mereka sebagai alat untuk memenuhi kepentingan mereka. Peran UNISFA berupa penyaluran dana bantuan maupun upaya teknis terhadap masyarakat.

Sebuah organisasi internasional menurut Teuku May Rudi memiliki beberapa criteria yang dapat memaksimalkan kinerja organisasi tersebut, yaitu;¹³

1. Memiliki kemampuan mengadakan perjanjian.
2. Memiliki kemampuan mengajukan tuntutan terhadap negara-negara anggota maupun negara bukan anggota terhadap hal-hal yang merugikan organisasi.
3. Adanya hak dan kewenangan secara hukum untuk memiliki asset berupa barang-barang seperti bangunan, peralatan milik organisasi tersebut, serta status khusus bagi personalia yang diberikan kepercayaan atau diakreditasi atas nama organisasi.
4. Memiliki tempat kedudukan untuk mengajukan perkara ke pengadilan internasional berdasarkan yurisdiksi internasional.
5. Adanya perlindungan fungsional terhadap staf dan personalia.
6. Memiliki hak organisasi yang disertai pengakuan atau penerimaan negara atau organisasi lain mengirim perwakilan dalam menghadiri berbagai konferensi internasional yang berkenaan.

¹³ Rudy, Teuku May. 2005. *Administrasi dan Organisasi Internasional*. PT Refika Aditama. Bandung. Hal 26

Konflik Sudan dengan Sudan Selatan sudah menjadi agenda besar di program perdamaian (peacekeeping) Komisi keamanan dalam naungan Perserikatan Bangsa Bangsa. Sebagai contoh dalam konflik Darfur adanya *United Nation Development Fund For Women* (UNISFEM) untuk melindungi dan mencegah adanya pemerkosaan terhadap perempuan dan melarang anak – anak menjadi tentara. UNIFEM adalah salah satu misi dari UNICEF dibawah naungan PBB yang didedikasikan untuk memajukan hak-hak perempuan dan mencapai kesetaraan gender. UNIFEM didirikan oleh Resolusi Majelis Umum PBB pada tahun 1976.¹⁴

Strategi pemberdayaan perempuan oleh UNIFEM juga dilakukan dengan mempromosikan keterlibatan perempuan dalam proses pembicaraan damai di wilayah yang berkonflik. Adanya peran perempuan dalam proses tersebut diharapkan dapat menyuarakan hak – hak mereka terkait upaya perlindungan dan pemenuhan. Persoalan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian telah dibahas dalam berbagai resolusi dan perjanjian Internasional. Pada tahun 1982, Majelis Umum PBB telah mengeluarkan Resolusi 37/63 (*Declaration on the Participation of Women in Promoting International Peace and Cooperation*)¹⁵.

Dalam upaya mengurangi dan mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Darfur, UNIFEM merancang beberapa program dengan fokus terhadap berbagai isu-isu perempuan di wilayah tersebut. Kegiatan UNIFEM dijalankan melalui kemitraaan dengan Misi PBB di Darfur (UNAMID), polisi lokal, polisi relawan, LSM lokal, para pemimpin suku

¹⁴ UNIFEM official. *About Unifem*. diambil dari situs www.unifem.org/about, diakses tanggal 18 juni 2013

¹⁵ Anderlini, Sanam Naraghi. 2000. *Women at the Peace Table: Making a Difference*. UNIFEM. Diakses dari situs http://www.unifem.org/materials/item_detailf6c8.pdf. Tanggal 27 juni 2013

serta tokoh-tokoh masyarakat. Salah satu kegiatannya difokuskan untuk melatih perempuan korban konflik di kamp-kamp pengungsi untuk melindungi diri dari kekerasan seksual.¹⁶

Konsep Resolusi Konflik

Resolusi Konflik dalam bahasa Inggris berarti *conflict resolution* memiliki makna yang berbeda – beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Pengertian Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine adalah tindakan mengurangi suatu permasalahan, pemecahan, dan penghapusan atau penghilangan permasalahan.¹⁷ Sedangkan Weitzman dalam Morton and Coleman, mendefinisikan resolusi konflik sebagai sebuah tindakan pemecahan masalah bersama (*solve a problem together*).¹⁸ Lain hal dengan Simon Fisher, dkk, yang menjelaskan bahwa resolusi konflik adalah usaha menangani sebab – sebab konflik dan berusaha membangun hubungan baru yang bisa tahan lama diantara kelompok-kelompok yang berseteru.

Menurut Mindes resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembang-kan rasa keadilan.¹⁹

Dari pemaparan teori menurut para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan resolusi konflik adalah suatu cara individu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dengan individu lain secara sukarela. Resolusi

¹⁶ UN WOMAN, Afrika, UN Woman takes action, diambil dari situs <http://www.unifem.org/worldwide/africa/>., diakses tanggal 19 juni 2013

¹⁷ Stewart Levine, *Getting to Resolution: Turning Conflict into Collaboration*. San Fransisco: Berrett Koehler Publishers Inc, 1998. hal. 3

¹⁸ Deutsch Morton, and Peter T. Coleman, *the Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*. San Fransisco: Jossey-Bass Publisher, 2006, hal. 197.

¹⁹ Simon Fisher, dkk, *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia, 2001, hal. 7.

konflik juga menyarankan penggunaan cara-cara yang lebih demokratis dan konstruktif untuk menyelesaikan konflik dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah mereka oleh mereka sendiri atau dengan melibatkan pihak ketiga yang bijak, netral dan adil untuk membantu pihak-pihak yang berkonflik memecahkan masalahnya.

Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian, konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Akan tetapi ada beberapa masalah yang harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik itu oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional. Menurut Johan Galtung ada tiga tahap dalam penyelesaian konflik yaitu:²⁰

1. Peacekeeping

Adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.

Dalam hal ini AS dan NATO melakukan intervensi militer dalam usahanya untuk menghentikan konflik yang terjadi di Kosovo. Karena kepemimpinan AS yang efektif di NATO, maka AS mengizinkan NATO untuk melakukan serangan ke Serbia dan memaksanya keluar dari Kosovo. Kemudian AS menerapkan resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1244 Tahun 1999 yang menempatkan Kosovo di bawah mandat PBB.

2. Peacemaking

²⁰ Hermawan, Yulius. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, isu dan Metodolgi*. Graha ilmu. Yogyakarta. 2007. hal 93

Adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.

Dikaitkan dengan kasus ini pihak – pihak yang bersengketa dipertemukan guna mendapat penyelesaian dengan cara damai. Hal ini dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai penengah, akan tetapi pihak ketiga tersebut tidak mempunyai hak untuk menentukan keputusan yang diambil. Pihak ketiga tersebut hanya menengahi apabila terjadi suasana yang memanas antara pihak bertikai yang sedang berunding.

3. Peacebuilding

Adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi social, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng. Melalui proses peacebuilding diharapkan negative peace (atau the absence of violence) berubah menjadi positive peace dimana masyarakat merasakan adanya keadilan social, kesejahteraan ekonomi dan keterwakilan politik yang efektif²¹.

Di dalam suatu kelompok, konflik adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Ketika anggota kelompok menyatakan masalah mereka dan mencari solusinya, konflik menjadi sumberdaya yang berharga dibandingkan sebuah masalah yang harus diselesaikan. Sebagaimana pengertian di atas, resolusi konflik artinya adalah suatu metode dan proses terkonsep yang digunakan untuk membantu menyelesaikan konflik dengan damai.²² Menurut Forsyth, ada beberapa metode untuk melakukan pelaksanaan resolusi konflik, sehingga dapat

²¹ Hermawan, Yulius. *Transformasi dalam studi Hubungan Internasional: Aktor, isu dan Metodologi*. Graha ilmu. Yogyakarta. 2007. hal 93

²² Donelson R. Forsyth, *an Introduction To Group Dynamics*. California: Brooks/Cole Publishing Company, 1983.

mengubah anggota kelompok yang berselisih menjadi sebuah perdamaian dan penyelesaian yang akur, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Commitment => Negotiation

Konflik dapat muncul ketika anggota di dalam kelompok merasa yakin dengan posisinya dan tidak ada keinginan untuk mengalah satu sama lain, namun konflik dapat diredakan ketika anggota kelompok memutuskan untuk bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat menguntungkan seluruh pihak. Negosiasi adalah proses komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh dua anggota atau lebih untuk mencari tahu masalah-masalah secara lebih spesifik, menjelaskan posisi mereka dan saling bertukar gagasan. Negosiasi terkadang lebih dari sekedar tawar-menawar atau saling berkompromi. Seperti negosiasi distributif, kedua belah pihak menyembunyikan orientasi kompetitif mereka dan secara bergantian sampai salah satu pihak mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari pihak yang lainnya.²³ Di lain pihak, seperti yang ditulis oleh Roger Fisher and William Ury, negosiasi integratif bertujuan untuk bekerjasama dengan anggota kelompok untuk meningkatkan kinerja kooperatif dan hasil yang integratif yang menguntungkan kedua belah pihak. Fisher dan Ury juga menyarankan anggota kelompok untuk membuat sesi penyelesaian masalah dan bekerja sama untuk menemukan solusi.

2. Misperception => Understanding

Konflik seringkali terjadi karena kesalah pahaman. Orang-orang sering menganggap bahwa orang lain ingin berkompetisi dengan mereka namun pada kenyataannya orang lain tersebut hanya ingin bekerjasama dengan mereka. Mereka mengira ketika orang lain mengkritik ide-ide mereka, orang lain tersebut sedang mengkritik mereka secara personal. Mereka percaya bahwa motif orang lain tersebut adalah untuk menguntungkan pihak mereka.

²³ Roger Fisher and William Ury, *Getting Yes*, 2nd ed. London: Random House Business Books, 1983. hal. xiiv.

Anggota kelompok harus menghilangkan pola pikir seperti itu dengan cara berkomunikasi secara aktif terkait motif dan tujuan mereka di dalam diskusi. Komunikasi tidak cukup untuk menyelesaikan konflik, tetapi mereka juga membuat kesalahpahaman serta tipu muslihat. Komunikasi dapat membuka peluang anggota kelompok untuk saling percaya, namun itu juga dapat menjadi “*boomerang*” bagi kelompok dengan adanya “*curahan hati*” dari anggota kelompok yang menunjukkan kebencian maupun ketidaksukaan pada anggota lain.²⁴

3. Strong Tactics => Cooperative Tactics

Ada berbagai cara anggota kelompok untuk mengatasi konflik mereka. Beberapa dari mereka hanya melihat kepada masalah mereka dan berharap masalah itu akan hilang dengan sendirinya. Beberapa anggota lainnya mendiskusikan masalah mereka, terkadang dengan tenang dan rasional, namun terkadang dengan marah dan keras. Yang lainnya mencari pihak yang netral untuk menjadi moderator dalam konflik tersebut. Dan mirisnya, ada anggota yang menggunakan kekerasan fisik. Taktik yang digunakan untuk menyelesaikan konflik pada dasarnya ada 4 (empat) kategori yaitu:

a. *Avoiding*

Pada dasarnya taktik ini adalah usaha untuk menghindari konflik tersebut dan berharap konflik itu akan hilang dengan sendirinya. Orang-orang yang mengadopsi taktik ini biasanya menghindari *meeting*, mengubah bahan pembicaraan ataupun keluar dari kelompok tersebut.

b. *Yielding*

²⁴ Donelson R. Forsyth, *an Introduction To Group Dynamics*. California: Brooks/Cole Publishing Company, 1983.

Anggota kelompok dalam menyelesaikan masalah yang besar maupun kecil dengan menyerahkan keputusan kepada orang lain. Setelah melalui proses diskusi dan negosiasi, anggota kelompok merasa gagasan mereka salah dan akhirnya menyetujui gagasan anggota kelompok lainnya. *Yielding* biasa terjadi akibat pola pikir anggota yang berubah dan setuju dengan pendapat lainnya ataupun tekanan yang ada di dalam diri mereka.

c. *Fighting*

Pada sejumlah orang, mereka ingin menyelesaikan konflik dengan memaksa anggota lainnya untuk menerima pandangan mereka. Mereka melihat konflik sebagai situasi menangkalah dan menggunakan taktik yang kompetitif dan kuat untuk mengintimidasi anggota yang lain.

d. *Cooperating*

Anggota yang mengandalkan kerjasama dalam mengatasi konflik cenderung mencari solusi yang dapat diterima semua pihak. Mereka tidak memaksakan kehendak dan kompetitif. Alih-alih mereka menunjukkan akar dari permasalahan dan mencari solusi yang tepat untuk masalah mereka. Orientasi ini disebut sebagai *win-win solution* karena menganggap hasil yang menyangkut orang lain merupakan hasil mereka juga.

Metode *avoiding* dan *fighting* dianggap metode yang negatif karena berpotensi melahirkan konflik yang baru dan membiarkan konflik yang ada sehingga tidak terselesaikan. Di lain pihak metode *yielding* dan *cooperating* merupakan metode yang baik dan menghasilkan solusi yang dapat diterima semua pihak. Sedangkan metode *fighting* dan *cooperating* merupakan metode yang aktif karena adanya usaha nyata untuk menyelesaikan konflik sedangkan metode *avoiding* dan *yielding* merupakan metode yang pasif.

4. Upward => Downward Conflict Spirals

Kerjasama yang konsisten diantara orang untuk jangka waktu yang panjang dapat meningkatkan rasa saling percaya. Tetapi ketika anggota kelompok terus bersaing satu sama lain, rasa saling percaya akan menjadi lebih sukar dipahami. Ketika seseorang tidak dapat mempercayai orang lain, maka mereka akan bersaing untuk mempertahankan hal yang menguntungkan dirinya atau hal yang dapat menghilangkan persaingan adalah *tit-for-tat* atau TFT. *Tit-for-tat* adalah strategi tawar menawar yang berawal dari kerjasama, tapi kemudian meniru pilihan yang dibuat orang lain. Dengan kata lain, orang akan bersaing jika orang lain bersaing dan orang akan bekerjasama jika orang lain bekerjasama.

5. Many => One

Individu yang tidak terlibat dalam masalah tidak seharusnya memihak salah satu pihak melainkan harus menjadi mediator dalam konflik tersebut. Pihak ketiga (netral) dapat membantu meredakan konflik dengan cara:

- a. Meredakan frustrasi dan kebencian dengan memberi kedua belah pihak sebuah kesempatan untuk mengungkapkan perasaan mereka;
- b. Jika komunikasi tidak lancar, pihak ketiga dapat membantu untuk meluruskan masalah;
- c. Pihak ketiga dapat menyelamatkan “*muka*” dari yang berkonflik dengan membebaskan kesalahan pada diri mereka sendiri;
- d. Pihak ketiga dapat mengajukan proposal alternatif yang dapat diterima oleh kedua pihak;
- e. Pihak ketiga dapat memanipulasi aspek-aspek *meeting* seperti lokasi, tempat duduk, formalitas komunikasi, batasan waktu, hadirin dan agenda;
- f. Pihak ketiga dapat membimbing semua pihak untuk menggunakan proses penyelesaian masalah secara integratif.

Namun, jika pihak-pihak ingin menyelesaikan konflik dengan cara mereka sendiri, maka intervensi dari pihak ketiga akan dianggap sebagai gangguan yang tidak diinginkan.

Keefektifan pihak ketiga tergantung dari kekuatan mereka di dalam kelompok. Di dalam prosedur *inquisitorial*, pihak ketiga akan memberikan pertanyaan kepada kedua belah pihak dan memutuskan hasil yang harus diterima semua pihak. Di dalam *arbitration* kedua belah pihak memberikan argumen-argumen kepada pihak ketiga yang akan membuat sebuah keputusan berdasarkan argumen yang diberikan. Di dalam situasi kedua pihak dan pihak ketiga berdiskusi, di situasi yang terbuka dan tidak formal tentang masalah dan solusi yang memungkinkan

6. Anger => Composure

Ketika keadaan “*memas*”, anggota kelompok yang bertentangan harus mampu mengontrol emosi mereka. Metode yang efektif untuk mengontrol emosi adalah dengan berhitung 1 sampai 10 atau menyampaikan humor atau lelucon di kelompok. Humor dapat memberikan emosi yang positif dan dapat meredam emosi yang negatif seperti amarah. Kelompok juga dapat melestarikan budaya seperti pelarangan penunjukan emosi negatif, salah satu contohnya adalah amarah.

Menurut penjelasan teori resolusi konflik diatas bahwa menurut John Galtung, ada tiga tahap yaitu melalui proses *peacemaking*, *peacekeeping* dan *peacebuilding*. Dalam penyelesaian masalah perebutan wilayah Abyei antara pemerintah Sudan dan Sudan Selatan, UNISFA sebagai organisasi internasional melakukan berbagai strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa. UNISFA melakukan strategi dengan menjadi pihak ketiga antara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan untuk menentukan status akhir wilayah Abyei tersebut. PBB memberikan mandat kepada UNISFA untuk mengamankan wilayah Abyei dari segala ancaman fisik dari

serangan manapun dan menjaga wilayah Abyei dari semua tentara bersenjata kecuali tentara perdamaian UNISFA. Hal ini sesuai dengan perjanjian 20 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan bahwa wilayah Abyei bebas dari intervensi dari tentara negara Sudan dan Sudan Selatan. Pada akhir tahun 2011, kembalinya tentara Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan menduduki wilayah Abyei kembali yang menghambat kerja UNISFA dalam menjalankan mandatnya. Hal ini juga berarti Pemerintah Sudan dan Sudan Selatan melanggar perjanjian tanggal 20 Juni 2011. Proses peacemaking dalam penyelesaian masalah ini, UNISFA berusaha untuk mengeluarkan tentara kedua negara tersebut dan akan mengambil tindakan keras jika nantinya ada perlawanan dari tentara pergerakan negara tersebut.

D. Hipotesis

Strategi UNISFA dalam menjalankan mandatnya dengan mendukung kekuatan keamanan Abyei dengan cara; pertama, menjaga keamanan perbatasan flashpoint antara Sudan utara dan selatan oleh beberapa tentara militer dari beberapa anggota UNISFA. Kedua, memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan di zona aman perbatasan atau “14 miles area”. Ketiga, dengan memberikan pelatihan kepada polisi Abyei dan mengajarkan tentang hukum untuk menjaga keamanan infrastruktur minyak di Abyei.

E. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bagaimana Sudan Selatan menjadi Negara sendiri keluar dari kedaulatan pemerintahan Sudan.
2. Untuk mengidentifikasi sebab terjadinya konflik perebutan kota Abyei oleh pemerintahan Sudan dan Sudan Selatan
3. Untuk mengetahui strategi PBB yang diwakilkan oleh UNISFA dalam menangani masalah perebutan wilayah kota Abyei

F. Metode Penelitian

Peran UNISFA dalam mengamankan dan mencegah terjadinya perang atau pemberontakan dalam perebutan kota Abyei akan diteliti menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan kualitatif. Data-data dan informasi yang diperlukan dalam melengkapi tesis ini diperoleh dengan analisis tekstual terhadap kajian pustaka informasi media masa, elektronik atau internet, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan topik kajian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I Bagian ini akan menjabarkan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, kerangka konsep dan teori, tujuan penelitian, dan metode penelitian.

BAB II Bagian ini akan membahas tentang dinamika konflik Sudan dan Sudan Selatan sejak tahun 1967, serta bagaimana kedua Negara tersebut merebutkan daerah perbatasan yang kaya akan sumber alamnya.

BAB III Bagian ini akan membahas tentang peran lembaga Internasional dalam menangani isu perebutan wilayah antara sudan dan sudan selatan serta menjelaskan profil UNISFA secara umum dan bagaimana strategi mengamankan dan menyelesaikan masalah di kota Abyei.

BAB IV Merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan